

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggara otonomi daerah yang luas dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, pemerintah diberi kewenangan untuk menggali sumber-sumber dana bagi penyelenggara pemerintah dan pembiayaan pembangunan. Pajak daerah merupakan salah satu sumber dana potensial bagi daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonomi yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan daerah diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Peneliti akan mencoba mengemukakan beberapa pengertian pajak sebelum membahas pengertian Pajak Reklame karena Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang ada di Kota Yogyakarta.

Pengertian pajak daerah menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diterangkan bahwa : Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemerintah

daerah dan pembangunan daerah. Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan pada pembayaran sedangkan pelaksanaannya dimana perlu dapat dipaksakan. Pajak mempunyai peranan penting dalam pembiayaan keperluan Negara, penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan Negara yang semakin hari semakin penting. Hal tersebut dikarenakan untuk mebiayai keperluan Negara sekaligus untuk pembangunan masing masing daerah yang ada di Indonesia. Di tinjau dari lembaga pemungutannya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Antara jenis Pajak Daerah salah satunya adalah Pajak Reklame. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Dimana yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

Pajak Reklame menurut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pajak Reklame diterangkan bahwa : Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame. Pengenaan Pajak Reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten atau Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten\Kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah Kabupaten atau Kota,

pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Reklame di daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui seberapa besar dan bagaimana pengaruhnya jumlah penduduk, jumlah industri, PDRB dan jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak daerah khususnya dalam pajak reklame.

Syuhada Sofian (1997), dalam penelitiannya membuktikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap jumlah Penerimaan Pajak Reklame. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai salah satu faktor positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Penduduk dianggap sebagai pemacu pembangunan. Banyaknya jumlah penduduk akan memacu kegiatan produksi, konsumsi dari penduduk inilah yang akan menimbulkan permintaan agregat. Pada gilirannya, peningkatan konsumsi agregat memungkinkan usaha-usaha produktif berkembang, begitu pula perekonomian secara keseluruhan (Dumairy, 1996). Besar kecilnya penerimaan pajak sangat ditentukan oleh PDRB, jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, jadi PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan masing-masing jenis pajak daerah tersebut (Musgrave, 1993).

Menurut Sutrisno (2002) jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Jumlah industri adalah jumlah usaha industri baik industri kecil, menengah, maupun besar yang ada di Kabupaten Semarang. Jumlah industri yang menggunakan jasa pemasangan reklame juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Hal ini disebabkan apabila suatu industri yang ingin memasarkan produknya

dapat menggunakan atau memasang reklame agar dapat diketahui oleh masyarakat. Hal tersebut dapat menambah jumlah penerimaan pajak itu sendiri. Bertambahnya Jumlah Industri yang memasang reklame mengakibatkan obyek pajak bertambah luas, sehingga penerimaan daerah pun meningkat (Syuhada Sofian, 1997).

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai dan jasa akhir yang dihasilkan oleh BPS terhadap suatu daerah (BPS,2003). Salah satu faktor penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah tertentu dalam suatu periode tertentu dapat ditunjukkan oleh data PDRB daerah tersebut. Apabila nilai PDRB mengalami peningkatan maka akan membawa pengaruh positif pada kenaikan penerimaan daerah. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah, sehingga semakin tinggi pula kemampuan masyarakat tersebut untuk membayar Pajak Daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintah (Mardiasmo, 1995).

Sedangkan PDRB Perkapita adalah salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan rakyat di suatu wilayah tertentu. Karena pajak daerah merupakan salah satu dari pajak daerah maka akan semakin tinggi PDRB maka semakin tinggi penerimaan Pajak Daerah pada umumnya dan Pajak Reklame pada khususnya.

Penelitian Veronika Winarti Agustiningtyas (2003) juga melakukan analisis terhadap faktor faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Tengah. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa pendapatan

perkapita, jumlah wisatawan, investasi pemerintah dan daya listrik tersambung berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak reklame di Kota Yogyakarta ?
- b. Bagaimana pengaruh jumlah industri terhadap penerimaan pajak reklame di Kota Yogyakarta ?
- c. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak reklame di Kota Yogyakarta ?
- d. Bagaimana pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak reklame di Kota Yogyakarta ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang terurai maka tujuan penelitian yang hendak di capai penulis adalah untuk :

- a. Mengetahui berapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak reklame di Kota Yogyakarta.
- b. Mengetahui berapa besar pengaruh jumlah industri terhadap penerimaan pajak reklame di Kota Yogyakarta.
- c. Mengetahui berapa besar pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak reklame di Kota Yogyakarta.

d. mengetahui berapa besar pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak reklame di Kota Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah :

1. Bagi penulis

Menambah ilmu dan pengetahuan dalam bidang pengembangan potensi pajak daerah khususnya pajak reklame yang berada di Kota Yogyakarta.

2. Bagi masyarakat

Sebagai acuan agar masyarakat mengetahui dan menyadari pentingnya membayar pajak.

3. Bagi pemerintah

a. Sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan realisasi pajak Reklame Kota Yogyakarta.

b. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta dalam menerapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kota Yogyakarta.

4. Bagi pembaca

Sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian penelitian selanjutnya tentang peningkatan penerimaan Pajak Reklame Kota Yogyakarta.